

BAB XIII

PENINGKATAN INVESTASI, EKSPOR NON-MIGAS, DAN PARIWISATA

Krisis finansial global tahun 2008 merontokkan perekonomian dunia. Indonesia pun terimbas. Awal 2009, gelombang dampak krisis itu mulai menyentuh bumi Nusantara, dan juga Jawa Timur. Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai melanda sektor industri. Sampai dengan 27 Februari 2009, sebanyak 37.905 buruh terkena PHK akibat kolapsnya industri. Ini belum termasuk 16.329 buruh yang dirumahkan karena pabrik tidak optimal berproduksi. Sebagian besar buruh tersebut bekerja di industri pengolahan, perkayuan, dan kehutanan. Badai PHK dikhawatirkan akan berubah menjadi gelombang besar mengekor tren negatif kinerja ekspor nasional, yang puncaknya diperkirakan pada pertengahan 2009.

Di Jawa Timur, sampai dengan 27 Februari 2009, permohonan PHK untuk 1.247 buruh industri perkayuan, permebelan, dan kertas sudah diajukan ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Jawa Timur. Sebanyak 2.388 buruh lainnya juga terancam PHK, dan 2.638 buruh sektor transportasi dan makanan sudah dirumahkan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK) di Jawa Timur yang relatif tinggi pada 2008, besar kemungkinan akan ikut memuncak pada 2009. Angka sementara TPK pada 2008 tercatat 6,42%, dengan jumlah penduduk usia kerja sebanyak 28.952.236 orang; angkatan kerja, 19.958.436 orang, namun kesempatan kerja yang tersedia 18.970.514.

Krisis finansial global telah memupuskan kinerja ekspor non-migas Jawa Timur yang sebelumnya berkembang relatif menggembirakan. Kontribusi realisasi nilai ekspor non-migas Jawa Timur terhadap realisasi nilai ekspor non-migas nasional selama ini cukup tinggi. Pada 2005 mencapai 10,72%, kemudian meningkat menjadi 11,33% pada 2006, dan pada 2007 menjadi 12,92%.

Nilai ekspor non-migas Jawa Timur Tahun 2007 sebesar 11,770 miliar dolar AS atau mengalami peningkatan sebesar 30,50% dibanding 2006 yang mencapai 9,019 miliar dolar AS. Pencapaian ini menempatkan Jawa Timur pada posisi kedua dalam memberikan kontribusi ekspor nasional, setelah sebelumnya menempati urutan ketiga. Pesatnya pertumbuhan ekspor ini didukung oleh 10 komoditas utama Jawa Timur, yaitu pengolahan tembaga, timah; kimia dasar; pengolahan kayu; besi baja; pulp dan kertas; makanan dan minuman; tekstil; pengolahan karet; udang dan alat-alat listrik. Kesepuluh komoditas tersebut memberikan kontribusi terbesar

terhadap

terhadap ekspor Jawa Timur, yaitu sebesar 78,10%. Adapun sepuluh negara tujuan utama ekspor Jawa Timur adalah Jepang, Amerika Serikat, Malaysia, RRC, Thailand, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Australia dan Jerman.

Nilai ekspor Jawa Timur periode Januari-Desember 2008 mencapai 12,157 miliar dolar AS. Jika dibanding periode yang sama tahun 2007 yang mencapai 12,091 miliar dolar AS, hanya naik 0,54%. Komoditas utama ekspor Jawa Timur bulan Desember 2008 adalah tembaga yang menyumbang 11,45% terhadap total nilai ekspor Jawa Timur.

Volume ekspor tahun 2008 menurun. Dari 8,377 juta ton sepanjang 2007 menjadi 7,473 juta ton pada 2008. Pencapaian ekspor ini masih tetap didominasi produk hasil industri senilai 10,406 miliar dolar AS, sedang komoditas pertanian hanya menyumbang 948,31 juta dolar AS. Sisanya sekitar 33,7 juta dolar AS merupakan kontribusi dari sektor pertambangan.

Untuk tujuan ekspor utama, Jepang masih di peringkat pertama. Namun, nilai perdagangan mengalami penurunan 21,35%. Pada 2007 nilai ekspor ke Jepang mencapai 2,137 miliar dolar AS, tapi tahun 2008 anjlok menjadi 1,681 miliar dolar AS. Barang sekunder seperti furniture dan tekstil menjadi produk yang utama mengalami penurunan ekspor. Sementara untuk produk makanan dan minuman tetap stabil. Tahun 2009, ekspor Jawa Timur ke Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa diprediksi mengalami penurunan sekitar 20% akibat krisis ekonomi global. Penurunan ini terutama terjadi untuk produk sekunder.

Sementara itu, perkembangan investasi di Jawa Timur menunjukkan tren positif. Pada periode Januari-November 2008, tercatat ada 82 proyek penanaman modal asing (PMA) yang telah terealisasi senilai 2,5 juta dolar AS. Pada periode sama tahun sebelumnya (2007) hanya terdapat 70 proyek investasi baru yang terealisasi dengan nilai 759 ribu dolar AS. Untuk proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN), pencapaiannya juga meningkat, dari 17 proyek pada Januari-November 2007 dengan nilai Rp 16,28 triliun, menjadi 27 proyek dengan nilai Rp 19,24 triliun pada periode yang sama tahun 2008.

Meski demikian, perkembangan investasi itu diperkirakan tidak mampu menyerap kembali tenaga kerja korban PHK, sekaligus angkatan kerja baru akibat krisis finansial global. Sebab, jika bercermin pada tahun 2007, di mana ketika itu terdapat 22 proyek PMDN baru senilai Rp 16.705.091 juta, tenaga kerja yang diserap sebanyak 35.237 orang Indonesia, dan 5.360 tenaga kerja asing. Sedangkan proyek PMA sebanyak 85, dengan nilai investasi 855.227.000 dolar AS, menyerap 18.067

tenaga kerja Indonesia, dan 9 tenaga kerja asing.

Total tenaga kerja Indonesia yang bisa diserap melalui investasi (PMDN dan PMA) pada 2007 sebanyak 53.304 orang. Sementara jumlah pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2007 sebanyak 693.798 orang, dan jumlah penganggur mencapai 1.366.503 orang. Pada 2009, kondisi ini diperkirakan tidak jauh berbeda, dan masih ditambah tenaga kerja korban PHK, dan juga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dipulangkan. Tapi bagaimanapun, investasi dan ekspor non-migas Jawa Timur harus tetap didorong untuk terus meningkat.

XIII.1 Permasalahan

a. Prosedur Perijinan Panjang dan Mahal

Bank Dunia pernah menyoroti masalah pengurusan perijinan untuk memulai suatu usaha di negara-negara ASEAN, pada 2004. Di Indonesia, calon investor membutuhkan waktu lebih lama daripada Malaysia, Filipina, dan Thailand, karena harus menempuh 12 prosedur di berbagai instansi, baik pusat maupun daerah, selama 151 hari (sekitar 5 bulan), dan biaya sebesar 131% dari *per capita income* (sekitar 1.163 dolar AS).

Sedangkan di Malaysia, cukup melalui 9 prosedur dengan waktu hanya 30 hari, dan biaya sekitar 25% dari *per capita income* (sekitar 945 dolar AS). Di Filipina butuh 50 hari, dengan biaya 20% dari *per capita income* (sekitar 216 dolar AS), dan di Thailand hanya butuh 33 hari, dengan biaya 7% (sekitar 160 dolar AS) dari *per capita income*.

Hasil survei Bank Dunia lainnya, tentang faktor-faktor yang bermasalah dalam bisnis di 134 negara di dunia, termasuk Indonesia, ditemukan masalah terbesar dalam melakukan bisnis di Indonesia adalah birokrasi pemerintah yang tidak efisien. Jumlah prosedur untuk memulai bisnis di Indonesia berada di peringkat 103, jauh lebih rendah dari negara-negara ASEAN lainnya, Malaysia (peringkat 59), Thailand (44), Vietnam (91), bahkan Singapura berada di peringkat 9. Waktu yang diperlukan untuk memulai usaha di Indonesia juga sangat lama, yakni berada di peringkat 123, yang juga jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Singapura.

Dalam hal transparansi pembuatan keputusan, Indonesia berada di peringkat 121, dan berada di bawah semua negara ASEAN, kecuali Timor Timur (peringkat 127). Kondisi Indonesia yang disoroti survei Bank Dunia tersebut, tentunya juga menggambarkan keadaan di provinsi-provinsi, termasuk Jawa Timur.

Selama

Selama ini untuk berinvestasi di Indonesia, penanaman modal asing (PMA) harus memiliki 27 jenis perijinan dasar, dan berurusan dengan 21 instansi, sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) harus memiliki 26 jenis perijinan dasar dan berurusan dengan 20 instansi. Perijinan dasar tersebut belum termasuk perijinan tambahan yang jumlah dan jenisnya tergantung dari jenis kegiatan usahanya

Waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian perijinan dasar untuk usaha wajib Amdal, PMA, normatif 489 hari, tapi pengalaman investor 1.431 hari, sedangkan PMDN, normatif 482 hari, pengalaman investor 1.421 hari. Sedangkan untuk investasi tidak wajib Amdal, PMA, normatif 534 hari, pengalaman investor, 1.231 hari, sedangkan untuk PMDN, normatif 527 hari, pengalaman investor 1.123 hari

Instansi pemberi pelayanan ijin PMA/PMDN tersebar di Pusat, instansi Pusat di provinsi, instansi Pusat di kabupaten/kota, instansi terkait di provinsi, dan instansi terkait di kabupaten/kota. Praktik-praktik pungutan liar sulit dihindari pada semua jalur pengurusan perijinan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Akibatnya, investor menilai, iklim investasi di Indonesia, termasuk di Jawa Timur, belum kondusif, tidak aman dan tidak nyaman.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, menegaskan, pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan pemberian 52 jenis ijin usaha (ijin prinsip), 10 jenis perijinan pelaksanaan, dan tiga jenis perijinan operasional.

Prosedur yang panjang dan berbelit tidak hanya mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, tapi juga menghilangkan peluang usaha yang seharusnya dapat dimanfaatkan, baik untuk kepentingan perusahaan maupun kepentingan daerah, seperti penciptaan lapangan kerja.

Ekonomi biaya tinggi masih menjadi salah satu faktor penghambat investasi di Jawa Timur, dan di Indonesia pada umumnya. Hasil survei Bank Dunia pada 2008 menunjukkan, korupsi masih merupakan masalah terbesar ketiga yang mempengaruhi bisnis di Indonesia. Pemerintah sudah berupaya serius memberantas korupsi, tetapi belum tuntas. Praktik korupsi melahirkan ekonomi biaya tinggi, yang mempengaruhi kepercayaan calon investor, dan juga mempengaruhi kinerja ekspor, karena daya saing produk di pasar internasional menjadi rendah.

Sejalan otonomi daerah, persaingan antar-provinsi di Indonesia untuk meningkatkan investasi UKM dan menarik minat investor domestik maupun investor

asing untuk menanamkan modalnya semakin tajam dan ketat. Karena itu, untuk mengubah citra negatif birokrasi perijinan usaha dan investasi, Provinsi Jawa Timur menggagas dan melakukan penyederhanaan pelayanan perijinan penanaman modal melalui sistem pelayanan satu atap di provinsi, dan satu pintu di kabupaten/kota se-Jawa Timur.

b. Rendahnya Kepastian Hukum

Rendahnya kepastian hukum tercermin dari banyaknya tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah, dan antar-sektor. Belum mantapnya pelaksanaan program desentralisasi mengakibatkan kesimpangsiuran kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan investasi. Di samping itu juga terdapat keragaman yang besar dari kebijakan investasi antar-daerah.

Semuanya itu mengakibatkan ketidakjelasan kebijakan investasi, yang pada gilirannya menurunkan minat investasi. Penerapan peraturan daerah (perda) pungutan (retribusi, pajak daerah, dan pungutan lainnya) lebih didorong oleh keinginan menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) secara berlebihan. Pengeluaran perusahaan untuk “biaya tambahan” atau pungutan liar mencapai sekitar 11% dari biaya produksi.

c. Lemahnya Insentif Investasi

Pemberian insentif investasi di Indonesia relatif tertinggal dibanding negara-negara lain, termasuk insentif perpajakan, dalam menarik penanaman modal. Meski dengan tingkat pajak progresif yang diperkirakan relatif sama dengan negara-negara lain, sistem perpajakan di Indonesia kurang memberi kelonggaran perpajakan yang dapat mendorong investasi.

d. Belum Memadainya Infrastruktur

Hasil survei Bank Dunia pada 2008 menunjukkan, masalah terbesar kedua di Indonesia yang menghambat kegiatan bisnis dan investasi adalah infrastruktur yang tidak memadai. Kurang bergairahnya iklim investasi juga disebabkan oleh keterbatasan dari daya saing produksi (*supply side*), serta kapasitas sistem dan jaringan infrastruktur, karena sebagian besar dalam keadaan rusak.

Provinsi Jawa Timur, sebagai bagian dari Indonesia, juga tak terlepas dari masalah tersebut, seperti rusaknya sebagian infrastruktur ekonomi di Sidoarjo akibat semburan lumpur panas Lapindo, yang kemudian berdampak pada terganggunya prasarana jalan raya; kondisi infrastruktur jalan raya yang tidak memadai; ketersediaan listrik dan air; infrastruktur pertanian, seperti jaringan irigasi dan bendungan, yang tidak terpelihara dengan baik.

Keterbatasan kapasitas dan kualitas infrastruktur berpengaruh pada peningkatan biaya distribusi, yang pada gilirannya justru memperburuk daya saing produk. Di samping jaringan transportasi darat, ketidakefisiensian pengelolaan pelabuhan ekspor dan urusan-urusan kepabeanan juga merupakan masalah yang menghambat kinerja ekspor. Keterbatasan dan rendahnya kualitas infrastruktur seperti jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, dan jaringan komunikasi, merupakan faktor utama penyebab tingginya biaya ekspor.

e. Belum Optimalnya Pemberian Insentif dan Fasilitas

Pemberian insentif dan fasilitas eksportir kecil dan menengah masih belum optimal. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, dan kecilnya akses mereka terhadap informasi pasar dan sumber pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM) ekspor masih menjadi hambatan pokok UKM, yang sangat memberatkan dalam upaya menghasilkan produk yang memenuhi kuantitas pemesanan, dan kualitas yang konsisten dengan standar teknisnya.

f. Rendahnya Investasi di Sektor Pertanian

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sektoral relatif masih rendah, angka sementara pada tahun 2008, mencapai 3,12%. Pada tahun sebelumnya (2007), sektor pertanian tumbuh sebesar 3,13%. Kenyataan ini merefleksikan kinerja sektor tersebut belum sesuai yang diharapkan, investasi di sektor tersebut juga relatif masih rendah.

Hal yang sama juga terjadi pada ekspor non-migas komoditas pertanian, pada 2008 hanya menyumbang 948,31 juta dolar AS terhadap total nilai ekspor 12,157 miliar dolar AS, sementara produk hasil industri mencapai 10,406 miliar dolar AS. Sejalan dengan pengembangan agroindustri dan agrobisnis, serta pembentukan kawasan agropolitan sebagai bagian dari revitalisasi pertanian dan ekonomi pedesaan, maka investasi, dan juga ekspor sektor pertanian sangat mendesak untuk ditingkatkan.

XIII.2 Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam upaya meningkatkan investasi dan ekspor non-migas adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi melalui penyederhanaan prosedur perijinan, dan meningkatnya kepastian hukum.

Reformasi dimaksud mencakup upaya menuntaskan sinkronisasi, sekaligus deregulasi peraturan antarsektor dan antara pusat dengan daerah, serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk implementasi penyederhanaan prosedur perijinan untuk memulai usaha, penyempurnaan sistem perpajakan dan kepabeanan, penegakan hukum untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban berusaha.

2. Meningkatnya investasi secara bertahap sehingga perannya terhadap Produk Domestik Regional Bruto meningkat, terutama investasi di bidang pertanian.
3. Meningkatnya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur untuk mendukung peningkatan investasi dan ekspor.
4. Meningkatnya pertumbuhan ekspor secara bertahap, dengan komposisi produk yang lebih beragam, dan berdaya saing tinggi.
5. Meningkatnya keberdayaan eksportir kecil dan menengah melalui pemberian insentif dan fasilitasi akses informasi dan sumber pembiayaan.
6. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi daerah, tertib niaga, dan kepastian berusaha untuk mewujudkan perdagangan yang kondusif dan dinamis.
7. Meningkatnya efisiensi pelayanan ekspor-impor kepelabuhanan, kepabeanan, dan administrasi (verifikasi dan restitusi) perpajakan.
8. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perolehan devisa.

XIII.3 Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, penciptaan iklim investasi yang sehat dan peningkatan daya saing ekspor dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan:

1. Mengurangi biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi, baik untuk tahapan memulai maupun operasi suatu usaha, melalui penuntasan deregulasi peraturan dan penyederhanaan prosedur perijinan, serta pengembangan kapasitas lembaga publik pelaksananya, terutama untuk mengurangi hambatan usaha kecil dan menengah.
2. Mendorong terbentuknya “kantor pelayanan terpadu” (satu pintu/satu atap) untuk perijinan investasi, di mana Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertindak sebagai *channeling facilitator*.
3. Meningkatkan jaminan kepastian usaha dan penegakan hukum, terutama berkenaan kepentingan menghormati kontrak usaha; menjaga hak kepemilikan

(*property rights*), terutama berkenaan dengan kepemilikan lahan; dan pengaturan yang adil pada mekanisme penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat (*dispute settlements*), terutama berkenaan perselisihan niaga, perkuatan implementasi persaingan usaha, perkuatan implementasi standarisasi produk-produk yang dipasarkan, serta penyelesaian konflik antara produsen dan konsumen untuk tujuan perlindungan konsumen.

4. Memperbaiki kebijakan investasi sesuai praktik internasional terbaik, dan mengutamakan perlakuan non-diskriminatif antara investor asing dan domestik, serta antara investor besar dan skala kecil-menengah, merumuskan sistem insentif dalam kebijakan investasi untuk menarik investor asing; serta merumuskan reformasi kelembagaan penanaman modal sebagai lembaga fasilitasi dan promosi investasi yang berdaya saing.
5. Mengharmoniskan peraturan perundangan antara pusat dan daerah, antara provinsi dan kabupaten/kota, serta antar-kabupaten/kota, terutama dalam pengembangan (formalisasi) dan operasionalisasi usaha yang mengedepankan prinsip kepastian hukum, deregulasi (simplifikasi) dan efisiensi dalam biaya dan waktu pengurusan.
6. Meningkatkan akses dan perluasan pasar ekspor, serta perkuatan kinerja eksportir dan calon eksportir, melalui perluasan basis produk ekspor, peningkatan nilai tambah ekspor secara bertahap, terutama dari dominasi bahan mentah (sektor primer) ke barang setengah jadi dan barang jadi.
7. Revitalisasi kinerja kelembagaan promosi ekspor, dan perkuatan kapasitas kelembagaan pelatihan eksportir kecil.
8. Meningkatkan dan perbaikan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi dan ekspor, termasuk infrastruktur pertanian dan pedesaan.
9. Meningkatkan investasi di bidang pertanian untuk pengembangan agroindustri/agrobisnis, dan pembangunan kawasan agropolitan, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang berorientasi ekspor.
10. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi daerah, tertib niaga, dan kepastian berusaha, melalui harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, antara provinsi dan kabupaten/kota, serta antar-kabupaten/kota, penyederhanaan prosedur perijinan yang menghambat kelancaran arus barang, serta pengembangan kegiatan jasa perdagangan.
11. Fasilitasi pengembangan prasarana distribusi tingkat regional dan prasarana sub-sistem distribusi pada daerah tertentu, khususnya daerah terpencil, dan

sarana penunjang perdagangan melalui pengembangan jaringan informasi produksi dan pasar, serta perluasan pasar lelang lokal dan regional.

12. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, melalui pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata, sekaligus meningkatkan investasi di bidang pariwisata daerah.

XIII.4 Program

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program-program pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu program prioritas dan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

XIII.4.1 Program Prioritas

a. Program Perbaikan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program ini bertujuan menciptakan dan meningkatkan iklim investasi yang berdaya saing global, sehingga meningkatkan jumlah investasi di Jawa Timur, baik PMA maupun PMDN.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Penyempurnaan peraturan di bidang investasi yang non-diskriminatif, dan mampu menekan ekonomi biaya tinggi.
2. Penyederhanaan prosedur pelayanan penanaman modal dengan mengembangkan pelayanan perijinan satu pintu atau satu atap, melalui pengembangan “kantor pelayanan terpadu” yang memberikan *one stop services*, termasuk menempatkan perwakilan seluruh badan/instansi Pusat terkait pada “kantor pelayanan terpadu”, dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia lokal.
3. Pemberian insentif penanaman modal yang lebih menarik, dan melakukan konsolidasi perencanaan penanaman modal.
4. Pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan pelaksanaan investasi, baik asing maupun domestik.

b. Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama

Investasi

Program ini bertujuan meningkatkan kerja sama investasi, baik PMA maupun PMDN di Jawa Timur melalui promosi peluang-peluang investasi yang dapat

dilakukan

dilakukan di Jawa Timur.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Pengembangan sistem informasi penanaman modal.
2. Fasilitasi terwujudnya kerja sama strategis antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), terutama investasi di bidang pertanian.
3. Promosi investasi yang terkoordinasi, baik di dalam dan di luar negeri, dan revitalisasi kinerja kelembagaan promosi ekspor.
4. Fasilitasi peningkatan koordinasi dan kerja sama di bidang investasi dengan instansi pemerintah dan dunia usaha, baik di dalam maupun luar negeri.
5. Pengembangan bisnis di bidang pelabuhan melalui kerja sama pihak swasta, *out-sourcing* maupun *public private partnership*, pada lokasi pelabuhan potensial.

c. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

Program ini bertujuan meningkatkan daya saing potensi Jawa Timur dalam rangka menarik minat para calon investor.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Perkuatan kelembagaan penanaman modal, dan melakukan kajian kebijakan penanaman modal, baik dalam dan luar negeri.
2. Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah yang terkait dengan investasi, termasuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk mendukung peningkatan investasi.
3. Penyiapan dan pengembangan perencanaan penanaman modal di wilayah Madura pasca-beroperasinya Jembatan Suramadu, yang disesuaikan budaya masyarakat lokal.
4. Pengembangan kebijakan investasi pada agroindustri/ agrobisnis, termasuk penanganan pasca-panen, pengolahan, dan pemasarannya, dan usaha perdagangan berskala kecil dan menengah.

d. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program ini bertujuan meningkatkan daya saing global produk Jawa Timur, serta meningkatkan peran ekspor barang dan jasa dalam rangka meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, serta perluasan lapangan kerja.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Pengembangan strategi pemantapan ekspor untuk meningkatkan kinerja ekspor

Jawa Timur, termasuk pemanfaatan preferensi dengan mitra dagang.

2. Harmonisasi kebijakan ekspor antar-instansi terkait dan dunia usaha.
3. Peningkatan dan perkuatan kapasitas kelembagaan promosi daerah sesuai kebutuhan eksportir secara berkelanjutan.
4. Peningkatan kualitas pelayanan kepada para eksportir dan calon eksportir, terutama usaha kecil dan menengah melalui pendekatan *support at company level*.
5. Fasilitasi peningkatan mutu produk komoditas pertanian, perikanan dan industri yang berpotensi ekspor.
6. Melanjutkan deregulasi dan debirokratisasi melalui penyederhanaan prosedur ekspor dan impor ke arah penyelenggaraan konsep *single document*, dan secara bertahap mengarah pada *paperless* yang mendayagunakan dokumen elektronik.
7. Penyederhanaan prosedur pelayanan ekspor-impor dengan mengembangkan pelayanan perijinan satu pintu atau satu atap, melalui pengembangan “kantor pelayanan terpadu” yang memberikan one stop services, termasuk menempatkan seluruh perwakilan badan/instansi Pusat terkait pada “kantor pelayanan terpadu” dengan mengutamakan sumber daya manusia lokal.
8. Perkuatan kapasitas laboratorium penguji produk ekspor-impor.
9. Peningkatan jaringan informasi ekspor dan impor agar mampu merespon kebutuhan dunia usaha, terutama eksportir kecil dan menengah.
10. Peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran hasil produksi UMKM, serta peningkatan inovasi proses, rancangan dan kemasan produk UMKM yang berorientasi ekspor.

e. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini bertujuan meningkatkan efisiensi distribusi perdagangan, sarana dan prasarana penunjang perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing produk Jawa Timur.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Perumusan alternatif solusi, dan implementasi penyelesaian permasalahan, termasuk harmonisasi berbagai perangkat peraturan perundang-undangan tentang distribusi dan sarana penunjang perdagangan.
2. Deregulasi dan debirokratisasi untuk mengurangi hambatan perdagangan.
3. Pemberdayaan pengusaha dagang mikro, kecil dan menengah melalui

peningkatan

peningkatan sumber daya manusia, akses pasar, dan kemitraan usaha.

4. Pemantapan dan pengembangan pasar lelang lokal dan regional, serta sarana alternatif pembiayaan.

XIII.4.2 Program Penunjang

a. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen

Program ini bertujuan memberdayakan konsumen, penguatan lembaga perlindungan konsumen, dan peningkatan kapasitas kelembagaan metrologi legal, serta optimalisasi pengawasan barang beredar terutama terhadap barang-barang strategis, obat dan makanan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Pemberdayaan konsumen dan peningkatan kapasitas lembaga perlindungan konsumen, termasuk kapasitas lembaga penyelesaian sengketa konsumen.
2. Perkuatan sistem dan pelaksanaan pengawasan barang beredar, terutama terhadap pengawasan barang-barang strategis, obat dan makanan.
3. Peningkatan pelayanan informasi dan advokasi terhadap kebijakan perlindungan konsumen guna meningkatkan kesadaran konsumen terhadap pentingnya standar barang dan jasa, terutama di bidang obat dan makanan.
4. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan perdagangan dalam negeri yang terkait dengan ekspor-impor, tertib usaha, tertib ukur, perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar dan jasa.
5. Sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan standar dan laboratorium metrologi legal, serta pelaksanaan pengawasan ukuran, takaran, timbangan, dan perlengkapannya (UTTP).

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program ini bertujuan meningkatkan pengelolaan destinasi wisata dan aset-aset warisan budaya menjadi objek daya tarik wisata yang kompetitif dengan pendekatan profesional, kemitraan swasta, pemerintah, dan masyarakat, serta memperkuat jaringan kelembagaan, dan mendorong investasi.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan investasi industri pariwisata, terutama agrowisata, melalui penyederhanaan perijinan, dan insentif perpajakan bagi investor.
2. Mendorong pengembangan daya tarik wisata unggulan di setiap

kabupaten/kota, secara bersama dengan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, untuk membuka lapangan kerja, dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

3. Pengembangan paket-paket wisata yang kompetitif di masing-masing destinasi pariwisata daerah.
4. Peningkatan kualitas pelayanan dan kesiapan daerah tujuan wisata, dan aset-aset warisan budaya sebagai objek daya tarik wisata yang kompetitif.
5. Revitalisasi dan pembangunan kawasan pariwisata baru, termasuk pula prasarana dan sarana dasarnya (seperti jaringan jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih, dan sarana kesehatan).
6. Pengembangan kawasan ekowisata (agrowisata) diintegrasikan dengan pengembangan kawasan agropolitan, dan wisata bahari.

c. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program ini bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara dalam rangka meningkatkan kinerja industri pariwisata di Jawa Timur.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Pemberian insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha pariwisata dalam membangun produk pariwisata (daya tarik dan sarana pariwisata), terutama di kawasan agropolitan, dan diarahkan untuk memperluas lapangan kerja.
2. Peningkatan sadar wisata di kalangan masyarakat, baik sebagai tuan rumah maupun calon wisatawan.
3. Memotivasi dan memberikan kemudahan bagi perjalanan wisata domestik.
4. Pengembangan sistim informasi pariwisata yang efisien dan efektif.
5. Optimalisasi kegiatan pameran pariwisata bertaraf nasional maupun internasional, di dalam maupun di luar negeri, baik pada negara-negara mitra pariwisata potensial maupun negara-negara yang memiliki kedekatan secara historis dan kultural dengan Indonesia, seperti Asia Timur, India dan Timur Tengah.